

**MONEY POLITIC (VOTE BUYING)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**
*(Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011
Di Desa Dannga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya,
Nusa Tenggara Timur)*

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.



Disusun oleh:

**FERIANTO BILI
12520034**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MONEY POLITIC (VOTE BUYING)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**
*(Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011
Di Desa Dannga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya,
Nusa Tenggara Timur)*



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2017

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferianto Bili

NIM : 12520034

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh yang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Ferianto Bili

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Oktober 2017
Pukul : 11:30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

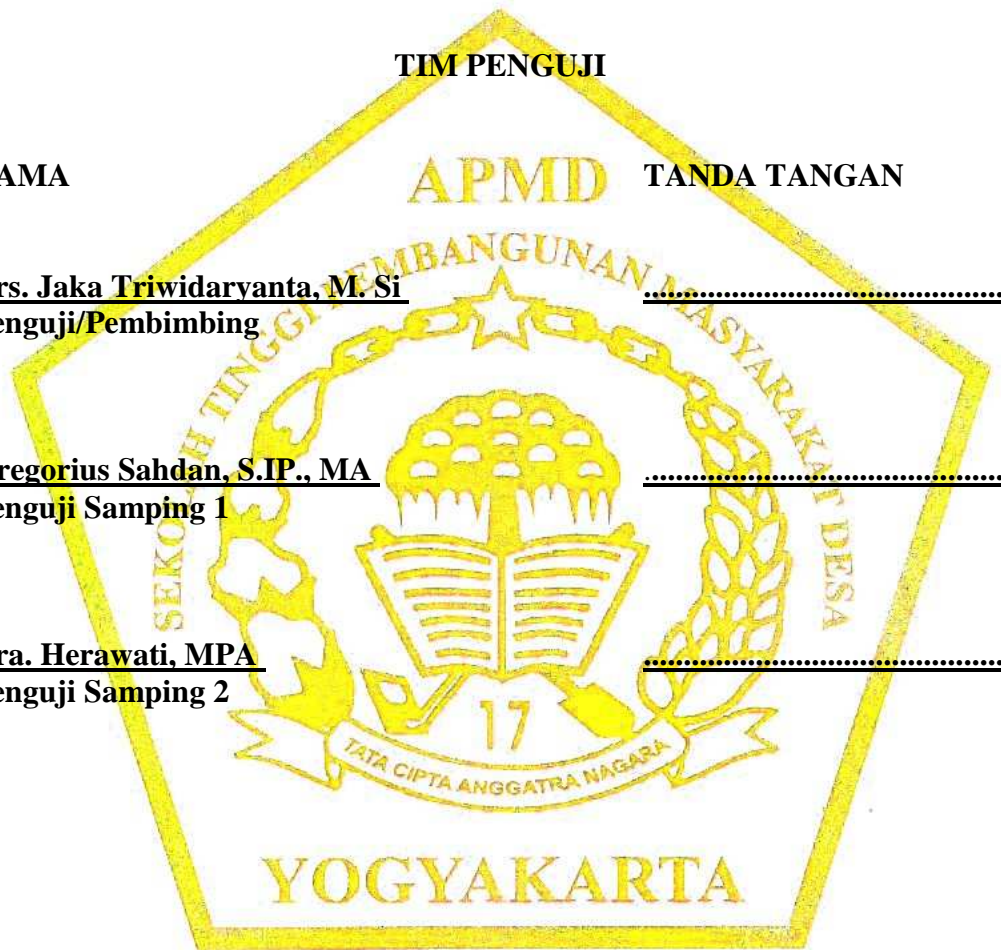
NAMA

APMD TANDA TANGAN

Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si
Penguji/Pembimbing

Gregorius Sahdan, S.IP., MA
Penguji Samping 1

Dra. Herawati, MPA
Penguji Samping 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)

Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

HALAMAN MOTTO

**Belajar Tidak Selalu Dari Buku, Lingkungan Juga Bisa Membuat Kita
Mengambil Pelajaran**

“Ciptakanlah sejarahmu sendiri dan ciptakanlah sejarah manusia”

(Feri Bili)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tersayang (Alm) Bapak A. B. Ngongo dan Ibu Ester Nono, yang selama ini selalu berusaha mendukung, memberikan semangat buat saya, membesarkan, merawat, membina, mendidik, membiayai, dan tidak bosan-bosannya untuk mendoakan saya dari jauh.
2. Untuk istri dan anakku yang tersayang Nolviana Milla, Amd, R.M, anak Joykenzi Fevi Chalizta Fraikaba, Joykeiza Chalarita Cinta Fraikaba. Yang sudah mendukung n membantu saya dalam proses perkuliaan dan yang selalu mendoakan saya dari jauh.
3. Untuk Kakak saya Yohanes Bili, Merlina Bili, Naomi Bili, Dorkas Bili, Oktavianus Bili, Domingggus Bili, S.pd, Elisabet Bili, Yunita Bili, Keponakan saya Ros Jaya Ate, Oktavianus M. Ate, S.pd, Erniati, Rusli, Herson, Arto, Helmi, Dini, Desi, Linus, Ferdi, Eben, Iren, Isto, Evan Ate, Afner, jems, richard, Lidwin, Handrid, Aret, Fingki, Tivani, Ina Fraikaba, Ariel, Audi, Windy. Yang selalu mendukung saya selama proses perkuliyahan n bantu dalam Doa.
4. Sahabat- sahabat senasip dan seperjuangan, Asterius Bili, Lius Nandu, Ary Radja, Yarti Lende, Lius Bani, Robin Mete, Jemy Mahemba, Okta Modo, Hardian, Niko L. Ama, Aziz Lubur, Endo, Dus, Herman, Yansen, Vike, yang selalu memberi saya semangat untuk proses studi dari awal sampai pada proses skripsi.
5. Teman- teman SWF Organisasi Daerah Dhoni Gaidon, Raden Bili, Reisa, Jibrail, Pace Kalis, Yuni Mahemba, Erin Naga, Maya Tanggu, Dony Wella, Fian, Arto, Irwan, Timo Bolo, Umbu, Nuel, Fila, Rias, Yofin, Feli, Tinus, Intan, Arsel. Yang selalu mendukung n mendoakan saya.
6. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan yang telah memberi kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA” (penelitian Deskriptif–Kualitatif di Desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana program studi ilmu pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penyelesain skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah di berikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Habib Muchsin, S.Sos, M. Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa” APMD” Yogyakarta.
2. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD” APMD” Yogyakarta.
3. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak ibu Dosen di program studi ilmu Pemerintahan STPMD ” APMD” Yogyakarta.
5. Pemerintah dan seluruh masyarakat desa Dangga Mangu Wewewa Timur Sumba Barat Daya yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa program ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang sudah bersama-sama berjuang dan saling membantu semasa proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung dan tidak secara langsung dalam penulisan skripsi ini, yang mana penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis masih merasa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari isi maupun teknik penyajian, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis sendiri maupun para pembaca sekalian.

Yogyakarta, Oktober 2017

Ferianto Bili

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Mafaat Penelitian	8
E. Karangka Teori.....	8
1. Strategi Vote Buying Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan.	9
a. Market Strategi.....	9
b. Efektivitas	17
2. Pemilihan Kepala Desa	23
a. Jaringan	23
b. Arena kontestasi	24
c. Transformasi Demokrasi	27

F. Ruang Lingkup Penelitian	32
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Unit Analisis	33
3. Teknik Pengumpulan Data	36
4. Teknik Analisis Data	37
BAB II PROFIL DESA DANGGA MANGU	39
A. Kondisi Umum Desa	39
1. Letak dan Batas Wilayah Desa Dangga Mangu	39
2. Secara Geografis	39
3. Luas Wilayah	40
4. Keadaan Demografi	40
5. Saran/Prasarana Perhubungan Dan Komunikasi	46
6. Sarana Pendidikan	47
7. Sarana Kesehatan	47
8. Keadaan Pemerintah Desa Dangga Mangu	47
B. Pemilihan Kepala Desa Dangga Mangu Sistem Dan Tahapan	51
1. Tahapan-Tahapan Pilkades Desa Dangga Mangu Tahun	
2011	51
2. Calon kepala desa yang lolos penjurangan penuhi syarat	
administrasi	52
3. Daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkades di desa	
dangga mangu	52

4. Anggaran biaya pemilukades di desa dangga mangu priode 2012-2017	53
5. Pembagian tugas/kerja penitia pemilihan kepala desa	54
6. Hasil pilkades terpilih	59
BAB III. ANALISIS DATA TENTANG MONEY POLITIC (VOTE BUYING) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2011.	
1. Bentuk Money Politic	60
2. Jaringan Dalam Money Politic	70
3. Aktor-Aktor	75
4. Sangsi-Sangsi	81
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan suatu kegiatan politik untuk memilih kepala desa yang dilaksanakan setiap kali habis pada masa jabatan kepala desa. Salah satu desa di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, Desa Dangga Mangu melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut terdapat sebuah pelanggaran pemilihan kepala desa, yang juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia, yakni politik uang (*money politic*). Politik uang merupakan tindakan oknum baik itu seseorang atau kelompok untuk mendapatkan dukungan suara agar bisa menang di pemilihan kepala desa. Tindakan yang dilakukan seperti memberi sesuatu kepada masyarakat, yang bentuknya dapat berupa barang ataupun berbentuk uang tunai. Penelitian ini melihat praktik politik uang saat pencalonan menjadi calon kepala desa, saat masa kampanye, dan saat pemungutan suara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana praktek *money politic (vote buying)* dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2011 di desa Dangga Mangu?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola atau cara kerja praktek *money politic (vote buying)* dalam pemilihan kepala desa Dangga Mangu Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya pada pemberian suara pilkades 2011.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini berjumlah 18 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi, yakni; observasi, Interview (wawancara), dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, data *display*, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian penulis dapat mendiskripsikan sebagai berikut: tindakan *money politic (vote buying)* saat pencalonan calon kepala desa, tidak terjadi, akan tetapi secara tidak langsung seorang calon kepala desa yang mempunyai uang banyak, melakukan tindakan seperti pada saat kumpul keluarga, dan ke tiap-tiap rumah. Tindakan politik uang saat masa kampanye, terjadi, dan merupakan hal yang paling sering terjadi karena hampir setiap kampanye atau sosialisasi, masyarakat akan diberi sesuatu, baik berupa barang seperti alat tenun ikat, atau pun berbentuk uang tunai. Hal ini dilakukan agar nantinya masyarakat memilih calon kepala desa saat pemilihan. Tindakan politik uang pada saat pemilihan, terjadi, karena saat pemilihan ada saja oknum yang melakukan tindakan politik uang, dengan memberi masyarakat sang pemilik suara sejumlah uang agar mereka memberikan suara pilihannya kepada calon yang telah memberi sejumlah uang. Banyaknya terjadi tindakan politik uang dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap sesuatu yang diberikan oleh para calon kepala desa dan tim suksesnya adalah hal yang biasa dan adanya masyarakat yang hanya akan memilih jika mereka diberi sejumlah uang. Dalam hal ini karena kesejahteraan dan pendidikan politik masyarakat yang masih rendah. Dengan adanya peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, melakukan pendidikan politik dan pihak pemerintah daerah dan panitia pemilihan melakukan sosialisasi yang sebenarnya kepada masyarakat, dan juga dari calon-calon kepala desa harus ada pegesan dari panitia pemilihan, agar tidak menghasilkan para calon kepala desa yang hanya mengandalkan uangnya.

Kata Kunci : *Money Politic (vote buying)*, Pemilihan Kepala Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini untuk mendapat sesuatu yang diinginkan banyak hal-hal yang dilakukan baik itu halal maupun tidak halal. Sama halnya dalam dunia perpolitikan untuk mendapatkan posisi yang strategis banyak sekali politikus-politikus menggunakan banyak cara untuk menempati sebuah posisi yaitu "*kekuasaan*". Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi. Demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat, karena disinilah rakyat memiliki peranan yang sangat penting. Demokrasi adalah kata kunci dalam mewujudkan sistem kedaulatan rakyat. Wujud dari demokrasi di Indonesia salah satunya ialah ditandai dengan maraknya partai politik yang bermunculnya dengan berlandaskan sebagai wadah aspirasi rakyat.

Untuk dapat sebuah jabatan tentu saja para Calon Kepala Desa haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar mereka bisa menduduki jabatan Kepala Desa yang katanya bahwa mereka itu mengatas namakan kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto dengan tujuan agar masyarakat mengenal mereka. Cara mobilisasi dukungan yaitu money politic dengan cara memberikan janji kepada rakyat. Seperti halnya membangun rumah ibadah,

dan memperbaiki jalan-jalan rusak yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat agar rakyat memilih mereka.

Selain itu hal yang paling parah ialah mereka melakukan ”*money politic (vote buying)*” atau “*politik uang*”. Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit rakyat yang lebih pintar, memanfaatkan mereka yaitu dengan cara mereka tetap mengambil uang yang para calon Kepala Desa berikan tetapi masyarakat tidak memilih mereka. Praktek-praktek yang demikian inilah yang merusak esensi dari demokrasi.

Desa merupakan cerminan dari Negara, karena desa adalah bagian pemerintahan paling kecil dan paling bawah dari Negara. Gambaran demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat dari demokrasi di tingkat desa dimana dalam kehidupan masyarakat desa pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan sebagai jalan terakhir adalah pengambilan suara terbanyak. Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), setiap calon kepala desa bersaing secara ketat dan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Termasuk dengan cara pembagian uang (*Money Politic*) kepada setiap warga untuk mendapatkan simpati. Sutoro Eko, dkk, dalam buku *Manufesto Pembaruan Desa* menjelaskan pengalaman pilkades selama ini penuh dengan paradoks dan distorsi yang membuat pilkades tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Lebih lanjut ia mengatakan pilkades selalu syarat dengan permainan politik uang (*money politic*) dan bahkan semakin menonjol di era reformasi.

Contoh-contoh kasus praktik money politik yang pernah terjadi di beberapa daerah, sebagai berikut: Sewaktu pemilihan kepala daerah oleh DPRD politik uang juga mengemuka namun dalam pilkada secara langsung semakin meluas, misalnya, 147 warga Kampung Bantar Panjang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada (*Kompas*, 10 April 2008). Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya memengaruhi pilihan masyarakat. Syamsuddin Haris mengatakan bahwa partai politik dalam mengusung calon di pilkada lebih pada pertimbangan kemampuan finansial calon yang bersangkutan. Dalam rekrutmen, lebih terkesan para sang calon yang membutuhkan “perahu” partai politik.

Jakarta - Pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 didominasi oleh praktik money politic (vote buying). Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot media massa dengan 1.716 ekpose pemberitaan. Sementara urutan kedua sekitar 18 persen media menyorot soal penggelembungan suara dengan 593 berita (ekspose). 18 persen menyoroti soal pencoblosan ulang dengan 393 berita (ekspose). 9 Persen menyoroti pelanggaran kode etik dengan 315 berita (ekspose) dan 9 persen lainnya menyoroti penghitungan ulang dengan 304 berita (ekspose).

Money politic (vote buying) dalam tingkat desa terjadi dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2011 di Desa Dangga Mangu, yang mana pada tahun 2011 peserta calon kepala desa berjumlah empat orang (4 orang).

Dari keempat calon ini terdapat satu orang (1 orang) calon Kepala Desa Dangga Mangu yang melakukan transaksi money politic (vote buying) secara langsung terhadap masyarakat maupun melalui tim sukses yaitu paket nomor urut empat (4) atas nama (UK). Berdasarkan yang saya ketahui secara langsung bahwa Calon Kepala Desa nomor urut empat membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp 50.000-Rp 100.000 (Lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah) dan diperkuat pula oleh informasi dari warga masyarakat dan para Calon Kepala Desa lain, bahwa calon kepala desa nomor urut empat membagikan uang maupun membagikan sembako. Tujuan dari calon Kepala Desa Dangga Mangu nomor urut empat dalam membagi uang ialah agar masyarakat Desa Dangga Mangu tidak memilih atau mencoblos calon lain dan yang dicoblos adalah calon yang membagikan uang.

Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa calon nomor urut empat menghabiskan uang untuk dibagikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta ribu rupiah). Ada pula sumber informasi yang mengatakan bahwa sumber dana kampanye calon Kepala Desa Dangga Mangu nomor urut empat berasal dari Kontraktor dan beberapa CV.

Hal ini memperkuat bahwa praktik money politic (vote buying) sudah merambat pada pemerintahan tingkat paling bawah yakni tingkat desa. Pemahaman masyarakat Desa Dangga Mangu terhadap tindakan politik uang (Money Politic) masih sangat kurang sehingga praktik money politic (vote buying) dapat berjalan tanpa adanya kontrol maupun respon dari masyarakat itu sendiri. Ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa uang yang dibagikan merupakan rejeki ataupun bonus pada masa kampanye.

Sudah dijelaskan dalam Undang-undang yang mengatur tentang tindakan money politic (vote buying) dalam masa kampanye bisa dikenakan pasal pidana. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 mengatur larangan melakukan politik uang terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J. Berbunyi: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yang menyatakan setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dipidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).Sebenarnya banyak hal yang bisa membuktikan terjadinya Praktek *Money Politic (vote buying)* dalam Pilkadaes yang akan datang, bukan harus melalui pengaduan orang yang menerima uang dari si calon. Masyarakat juga bisa untuk memberikan laporan kepada pihak berwajib bahwa telah terjadi *Money Politic (vote buying)*.

Pengertian politik uang adalah semua tindakan yang di sengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari kepada pihak-pihak tertentu. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas

Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, defenisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Secara umum money politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic (vote buying) sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Ada begitu banyak pola-pola praktek *money politic* (*vote buying*) yang dijalankan baik itu saat kampanye, serangan fajar maupun *door to door*. Agar praktek politik uang (*vote buying*) dapat berjalan biasa dibentuk tim pemenangan kandidat yang dibagi dalam tiga tim. *Pertama*, calon kandidat kepala desa; *kedua*, tim sukses formal atau agen yang terorganisir dan memiliki finansial; *ketiga*, tim sukses non formal atau tim yang bekerja dilapangan dan kecenderungan tidak memiliki sumber daya karena bekerja atas dasar kedekatan ataupun keluarga dari calon kandidat kepala desa. Biasanya yang dibagikan berupa uang dan barang (sembako, kaos, alat rumah tangga, atribut maupun *sovenir* dan lainnya). Sehingga mempengaruhi orang lain untuk menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan hati nurani.

Dari praktek politik uang (*vote buying*) akan berdampak pada akan terciptanya pemimpin yang menyalah gunakan jabatan dan terlibat kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terciptanya produk perundangan dan kebijakan kolutif dan tidak tepat sasaran, mengajarkan masyarakat untuk berperilaku curang, mencederai hak demokrasi, terjadi perpecahan antar warga masyarakat serta adanya pemikiran masyarakat untuk berbalas budi kepada mereka yang membagikan uang. Selain itu money politic (*vote buying*) bisa

terjadi karena masih kurangnya penegakan hukum di Indonesia dan Banwaslu masih kurang efektif dalam mengawasi pemilihan di tingkat desa agar berjalan sesuai tujuan. Money politic (vote buying) terjadi karena kurangnya edukasi politik dari pemerintah, tokoh masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Disisi lain tingkat pendidikan yang hampir mayoritas masyarakatnya masih berpendidikan rendah (lulusan Sekolah Dasar dan Lulusan Sekolah Menengah Pertama), money politic (vote buying) terjadi karena dipengaruhi oleh aspek perekonomian masyarakat yang masih sangat kecil pendapatannya. Dari beberapa masalah inilah yang menjadi pengaruh besar adanya tindakan money politic (vote buying) itu bisa terjadi dan sampai sekarang tindakan money politic (vote buying) semakin berkembang pesat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sampai pada tingkat desa.

Dari penjelasan diatas, sehingga mendorong saya untuk melakukan penelitian di Desa Dangga Mangu. Dari penelitian ini saya bisa membagi informasi terkait dampak dari money politic (vote buying) agar membuka wawasan baru masyarakat Desa Dangga Mangu sehingga apabila terjadi pesta demokrasi masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nurani serta proses demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana praktek *money politic (vote buying)* dalam pemilihan Kepala Desa tahun 2011 di desa Dangga Mangu?

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introducti Theories and Methods (Fifth Edition)*. Boston: Person Education Inc.
- Eko sutoro. (2003). *Manifesto Pembaharuan Desa,Apmd Press yogyakarta, yogyakarta.*
- Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Haryanto. (2015). *Politik Kain Timur, PolGov. yogyakarta*
- James A dan Dean J Champion. 1999. *Metode dan masalah penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kurniawan agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta.*
- Lubis, Hari. S. B. dan Martini Husaini. 1987. Teori organisasi (suatu pendekatan makro). Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Robbins S.P (2008) *Perilaku Organisasi Edisi 12*
- Schaffer, F & Schadler, A, What is Vote Buying, dalam Schaffer (ed) 2007, "election For Sale The Causes and Consequences Of Vote Buying" Line Reinner Publisher, London.
- Sumarto, M. 2014. Perlindungan Sosial dan Klientelisme makna politik Bantuan tunai dalam pemilihan umum. Yogyakarta: Gadjah Mada University press
- Tika, P. 2008. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang

<http://triyunirahma.blogspot.co.id/2014/03/money-politic.html>

(https://www.academia.edu/9081447/Money_Politics_Dalam_Pemilihan_Kepala_Desa.

Tahun_2013_di_Desa_Sumberejo_Kulon_Kecamatan_Ngunut_Kabupaten_Tulungagung)